Edisi Januari 2025

TABLOID RUMAH RAKYAT
• DPRD KOTA MAKASSAR

PERKUAT KOLABORASI

FREE

PENGANTAR

Pembina/Penasehat

Ketua DPRD Kota Makassar
Supratman
Wakil Ketua I
Andi Suharmika, S.H
Wakil Ketua II
Anwar Faruq, S.Kom
Wakil Ketua III
Eric Horas, SE., MM
Ketua Komisi A
Andi Pahlevi, SE, MM
Ketua Komisi B
Ismail, S.H
Ketua Komisi C
Azwar Rasmin
Ketua Komisi D
Ari Ashari Ilham, S.E

Pengarah: Sekretaris DPRD
Kota Makassar
H. Dahyal, S.Sos., M.Si

Penanggung Jawab
PPID Pembantu Sekretariat DPRD Kota Makassar
Kabag Persidangan
Dr. Hj. Widiawati Said, S.Sos., S.Pd
Kabag Humas dan Protokol
Syaril, S.STP
Kabag Keuangan
Abdul Kadir, SE, MM
Kabag Umum
Dr. Muhajir, S.KM., M.Kes

ALAMAT KANTOR
DPRD Kota Makassar
Jl. Andi Pangeran Pettarani,
Blok E NO. 1-2 Tidung, Kec
Rappocini, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90222.

Salam Hangat

Majalah Rumah Rakyat DPRD Kota Makassar edisi Januari 2025 kembali terbit. Kali ini menyajikan sejumlah berita dan informasi terkait aktivitas DPRD Kota Makassar selama Januari ini.

Upaya penguatan kolaborasi yang dilakukan pimpinan DPRD Kota Makassar dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi fokus dalam penerbitan kali ini. Mulai dari silaturahmi Kapolrestabes, Ketua Pengadilan Negeri, hingga Kepala Kejaksaan Negeri.

Aktivitas komisi-komisi di DPRD Kota Makassar juga tidak luput kami sajikan. Mulai dari rapat dengar pendapat yang digelar hampir semua komisi hingga kunjungan inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi C DPRD Makassar terkait dugaan adanya ruko atau bangunan ilegal.

Informasi penting lainnya adalah komitmen Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam mengawal dan menuntaskan 15 ranperda yang masuk daftar Prolegda 2025.

Aktivitas Sekretariat DPRD Makassar juga mewarnai pemberitaan edisi ini. Mulai dari rapat koordinasi staf DPRD hingga pelepasan dua staf atau ASN DPRD Kota Makassar yang pindah ke instansi lain.

Pengelola tentu sadar akan kekurangan dan kelemahan majalah itu. Oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif senantiasa dinantikan dari pembaca sekalian untuk perbaikan dan penyempurnaan majalah ini pada edisi berikutnya.

Akhirnya tim Rumah Rakyat menyampaikan selamat membaca. Semoga kehadiran majalah ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang aktivitas anggota DPRD Kota Makassar.
Salamakki...!

DAFTAR ISI

Beranda Parlemen

- Perkuat Kolaborasi dengan Forkopimda
- Silaturahmi dengan Kajari Makassar
- Dengan Pengadilan Negeri Kolaborasi Peningkatan Kesadaran Hukum
- Respons Demo Mahasiswa Soal Parkir Liar
- Terima Keluhan Warga Bitowa
- Sekretariat DPRD Makassar Gelar Pelepasan Dua ASN
- Ketua DPRD Makassar Bersama Wali Kota MakassarTerima LHPK Semester II Tahun 2024 dari BPK Sulsel
- Selamat Memperingati ISRA' MIRAJ

Fraksi

- Fraksi Gerindra Pantau Program Makanan Bergizi Gratis di Sekolah
- Fraksi Mulia Minta Pemkot Tunda Lelang Fisik 2025
- Ruslan Mahmud: Pemkot Kelebihan Honorer
- Rachmat Taqwa Kembali Umrahkan Konstituen
- Tahun Baru Imlek 2025, Ketua DPRD Makassar Ajak Perkuat Toleransi Antar Umat

Komisi

- Andi SuhadaApresiasi Program MBG
- Komis C Sidak Ruko tak Berizin di Bulusaraung
- Anggota Komisi A Soroti Maraknya Tenant di Pasar Segar yang Gunakan Fasum
- RDP Komisi D Bahas Dapodik
- Komisi A Minta Pemkot Akomodir Seluruh Tenaga Non-ASN

Metro

- Wacana Penambahan SMP Negeri
- Danny Pomanto: Itu Jika Dana Transfer
- Dewan Minta Pemkot Makassar Peduli Perkembangan Pelaku Usaha demi Peningkatan PAD
- Legislator Hanura Soroti Krisis Lahan Pemakaman
- Di Hadapan Menko Zulhas, Danny Pomanto Bahas Ketahanan Pangan Makassar Melalui Food Security
- Sekretariat Gelar Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025

Profil

- Bermula dari Bawah, Menjulang ke Puncak

Interupsi

- DPRD Larang Pelajar SMP Bawa Motor ke Sekolah
- Awasi Pendatang Baru Pasca Libur Nataru
- Dukung Polisi Selidiki Kebakaran Kantor Dinas Pendidikan
- Dispar dan Disbud Diminta Tingkatkan Promosi Kebudayaan

Bapemperda

- Optimis Tuntaskan 15 Ranperda Tahun 2025

Nasional

- Prabowo Ingin Penerapan e-Government Dipercepat
- Presiden Prabowo Putuskan PPN 12 Persen Hanya Dikenakan pada Barang Mewah

Lifestyle

- EVA Pendakian Terakhir, Film yang Terinspirasi dari Kisah Nyata

Kelengkapan

- Komposisi Alat Kelengkapan Dewan DPRD Makassar Periode 2024-2029

KOLABORASI. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman bersama pimpinan DPRD lainnya saat menerima kunjungan Kapolrestabes Makassar.

Perkuat Kolaborasi dengan Forkopimda

DI BAWAH kepemimpinan Supratman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terus mendorong penguatan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Terutama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Makassar.

Awal tahun 2025 ini, pimpinan DPRD Kota Makassar menerima kunjungan dua unsur Forkopimda. Kapolrestabes Makassar, Komisaris Besar Polisi Arya Perdana, S.L.K, M.Si dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, I Wayan Gede Rumega.

Dengan dua lembaga ini, pimpinan DPRD Kota Makassar berkomitmen melakukan sinergi dan kolaborasi dalam menata keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana yang datang bersama para pejabat utama Polrestabes Makassar diterima langsung Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman dan pimpinan DPRD Makassar lainnya, Kamis 16 Januari 2025.

"Kami memperkenalkan diri, sebelumnya saya bertugas di Depok. Alhamdulillah, situasi di sana aman karena kami selalu berkoordinasi dengan para tokoh. Hal serupa tentu kami harapkan di Makassar," ujar Kombes Pol Arya Perdana.

Ia juga mengungkapkan harapannya agar mendapat dukungan dari Ketua DPRD Makassar dalam menjalin komunikasi
terkait berbagai isu strategis di Kota Makassar.

Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyambut kunjungan Kapolrestabes Makassar tersebut. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu penting, termasuk upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar.

SINERGI. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman dan pimpinan DPRD Makassar lainnya saat silaturahmi ke Kepala Kejaksaan Negeri Makassar.

Silaturahmi dengan Kajari Makassar

KOLABORASI juga dilakukan DPRD Makassar dengan Kejaksaan Negeri Makassar. Empat pimpinan DPRD Kota Makassar sudah melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada Senin, 16 Desember 2024 lalu.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mempererat hubungan kerja sama dan silaturahmi antara DPRD Kota Makassar dan Kejari sebagai bagian dari sinergi antar lembaga pemerintah.

Ketua DPRD Kota Makassar Supratman bersama wakil ketua DRPD Andi Suharmika, Anwar Farug, dan Eric Horas diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar beserta jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai isu strategis, termasuk pentingnya penegakan hukum yang adil serta kerjasama untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Makassar.

Ketua DPRD Kota Makassar menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah awal untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan institusi penegak hukum.

"Kami berharap hubungan baik ini dapat terus terjalin untuk mendukung pembangunan kota yang bersih, transparan, dan berkeadilan," ujar Ketua DPRD.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nauli Rahim Siregar mengapresiasi kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi dengan DPRD.

"Kami siap mendukung dan berkoordinasi dengan DPRD dalam segala upaya untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik di Kota Makassar," ujarnya.

Dengan Pengadilan Negeri Kolaborasi Peningkatan Kesadaran Hukum

SELAIN dengan Polrestabes Makassar, DPRD Makassar juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pengadilan Negeri Makassar. Itu terungkap saat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Makassar, I Wayan Gede Rumega, berkunjung menemui Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, untuk silaturahmi antar kelembagaan, Selasa (14/1/2025).

"Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama lintas lembaga, terutama dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar," ujar Supratman.

Supratman juga berharap pertemuan ini dapat menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret antara DPRD dan Pengadilan Negeri Makassar.

"Kami berharap dapat mengadakan agenda kegiatan bersama yang melibatkan DPRD dan Pengadilan Negeri, terutama kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum serta sinergi dalam penyelesaian masalah di lapangan," kata Supratman.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Makassar, H. Muchlis A Misbah, turut menyampaikan pandangannya terkait kendala hukum yang sering dihadapi oleh anggota DPRD dalam mengambil kebijakan atau keputusan tertentu.

"Terkadang, kami menghadapi keraguan atau batasan hukum dalam melaksanakan tugas kami. Untuk itu, kami berharap ada pendampingan atau koordinasi yang lebih intens dari pihak pengadilan, agar kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wayan, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung DPRD Kota Makassar melalui komunikasi yang lebih erat, termasuk memberikan masukan hukum yang diperlukan.

Pertemuan berlangsung hangat dan diakhiri dengan diskusi terkait langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat sinergi.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara DPRD Kota Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar akan semakin solid, sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SILATURAHMI. Ketua DPRD Makassar, Supratman dan pimpinan DPRD lainnya menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Negeri Makassar.

Respons Demo Mahasiswa Soal Parkir Liar

ANGGOTA DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad dari Fraksi Mulia menerima Aspirasi Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum, di Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat, 17 Januari 2025.

Dalam aspirasinya, mahasiswa mengeluhkan sejumlah toko yang diduga masih melakukan parkir liar, salah satunya toko Alaska yang terletak di Jalan Pengayoman, Kota Makassar.

Di hadapan mahasiswa, Tri Sulkarnain mengungkapkan akan melakukan RDP secepatnya dengan menghadirkan pihak-pihak terkait guna mengklarifikasi terkait masalah tersebut.

"Secepatnya kami akan agendakan rapat kerja dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, PD Parkir, dan pemilik toko," kata legislator dari Partai Demokrat tersebut.

PARKIR ILEGAL. Anggota DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad menerima aspirasi mahasiswa yang berunjuk rasa terkait parkir ilegal.

WARGA BITOWA. Warga Kompleks Bitowa saat dialog bersama dengan sejumlah Anggota DPRD Makassar di ruang aspirasi di gedung DPRD Makassar, Senin (20/1/2025)

Terima Keluhan Warga Bitowa

RATUSAN warga Kompleks Bitowa yang tergabung dalam kelompok 'Warga Bersatu' menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Makassar, Senin, 20 Januari 2025. Kedatangan mereka diterima H Sangkala Saddiko (FPAN), Andi Hadi Ibrahim Baso (FPKS), Udhin Shaputra Malik (PDI-P), dan Hartono (FPKS).

Mereka meminta perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Dalam keterangannya, legislator Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengatakan bahwa dalam pertemuan singkat tersebut DPRD Makassar menyampaikan beberapa poin respons atas tuntutan warga.

Dalam pertemuan tersebut, ia menerima dan mendokumentasikan aspirasi warga dalam bentuk surat yang akan diteruskan kepada pimpinan DPRD Makassar.

Terkait permasalahan ini, Andi Hadi Ibrahim Baso mengungkapkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait.

"Insya Allah kami akan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Makassar," pungkasnya.

Sekretariat DPRD Makassar Gelar Pelepasan Dua ASN

Sekretaris DPRD Kota Makassar, H. Dahyal, memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan acara pelepasan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Sekretariat DPRD Kota Makassar yang akan berpindah tugas ke instansi lain.

Dua ASN yang dilepas tersebut adalah: Djamaluddin Tahir, SE dan Mestina, SE., MM. Kegiatan ini berlangsung di lapangan upacara Sekretariat DPRD pada pukul 07.30 WITA. Selasa (14/01/2025).

Dalam sambutannya, H. Dahyal menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada kedua ASN yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi besar selama bertugas di Sekretariat DPRD Kota Makassar.

"Hari ini adalah momen yang penuh rasa haru dan bangga. Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang luar biasa selama ini. Semoga di tempat tugas yang baru, saudara-saudara tetap membawa semangat dan integritas sebagai ASN," ujarnya.

Ketua DPRD Makassar Bersama Wali Kota MakassarTerima LHPK Semester II Tahun 2024 dari BPK Sulsel

KETUA DPRD Kota Makassar, Supratman bersama Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) Semester II Tahun 2024 dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyerahan dokumen tersebut dilakukan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, pada Kamis (09/01/2025).

Dokumen LHPK diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun dengan diawali dengan penandatanganan BAST.

Wali Kota Danny Pomanto mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK. Katanya, apa yang menjadi catatan-catatan atau rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami selalu menjadikan rekomendasi BPK ini untuk kemajuan Kota Makassar," singkat Danny Pomanto usai menerima LHP Semester II Tahun 2024 dari BPK.

Dirinya juga mengungkapkan hasil rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Juga memperkuat jalannya program kerja dari Pemerintah Kota Makassar agar tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ada.
"Jadi kemarin rekomendasi yang kita laksanakan itu mendongkrak PAD, kemudian jalannya program-program itu lebih baik" tuturnya.

PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KOTA MAKASSAR
SERAP ASPIRASI
DEMOKRASI TANGGUH
Mengucapkan
SELAMAT MEMPERINGATI
ISRA' MIRAJ
BAGINDA
NABI
27 RAJAB 1446 HIJRIYAH
SUPRATMAN
KETUA DPRD
A. SUHARMIKA
WAKIL KETUA I
ANWAR FARUQ
WAKIL KETUA II
ERIC HORAS
WAKIL KETUA III
Ajamma Ki Disini
humas dprdmakassar
dprd_makassar
Portal-DPRD
Kota Makassar

Fraksi Gerindra Pantau Program Makanan Bergizi Gratis di Sekolah

PANTAU. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, H Kasrudi memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di salah satu sekolah.

FRAKSI Gerindra DPRD Makassar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Makassar. Pemantauan dilakukan pada Senin, 20 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra Februari mendatang.

Program MBG dirancang oleh pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, agar memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi. Program ini sejalan dengan cita-cita awal pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, H Kasrudi memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Ia menegaskan pentingnya memastikan manfaat program ini dirasakan secara maksimal oleh para penerima.

"Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya Partai Gerindra untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan pangan, tidak hanya di Makassar tetapi juga di seluruh Indonesia," ujar Kasrudi.

Dengan pemantauan langsung di lapangan, Kasrudi berharap program MBG dapat mencapai targetnya dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat luas. "Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan memberikan manfaat nyata," tambahnya.

Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa depan.

Fraksi Mulia Minta Pemkot Tunda Lelang Fisik 2025

ANGGOTA DPRD Kota Makassar dari Fraksi Mulia mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk menunda pelaksanaan lelang kegiatan fisik tahun anggaran 2025. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan program-program pembangunan sejalan dengan visi dan misi Wali Kota terpilih yang akan memimpin Makassar pasca-Pilkada 2024.

"Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo," ujar Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Ray menambahkan, arahan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang telah ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tertanggal 11 Desember 2024.

Surat edaran ini menginstruksikan pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang belum mendesak hingga kepala daerah terpilih resmi menjabat.

"Tujuannya agar transisi pemerintahan dapat berjalan maksimal dan efektivitas program pembangunan lebih terjamin untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas," lugas Legislator dari Partai Demokrat ini.

Senada dengan Ray, Anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura, Muchlis Misbah, yang juga Bendahara Fraksi Mulia, turut mendukung langkah ini.

Ia menegaskan pentingnya menghormati proses transisi pemerintahan demi keberlanjutan pembangunan yang terarah.

Arahan ini menjadi penting mengingat pelaksanaan proyek fisik yang tidak sejalan dengan visi kepala daerah baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau inefisiensi anggaran.

Sebab, kata Muchlis Misbah, Pilkada 2024 sendiri telah menjadi momentum penting bagi warga Makassar dalam menentukan arah masa depan kota Makassar.

Dengan ditundanya lelang kegiatan fisik, menurut anggota Komisi D DPRD Makassar ini, pemerintah transisi bisa mempersiapkan langkah strategis untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Wali Kota Makassar yang baru.

FRAKSI MULIA. Fraksi Mulia DPRD Makassar meminta pemerintah kota menunda lelang proyek fisik 2025.

Ruslan Mahmud: Pemkot Kelebihan Honorer

SEKRETARIS Fraksi Golkar DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, meminta pemerintah kota di memperhatikan nasib tenaga non-ASN yang sampai saat ini belum terangkat menjadi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ruslan menyebut, Makassar terlalu banyak tenaga honorer sehingga kesejahteraan
mereka rendah.

Menurut Ruslan Mahmud, ada sekitar 2.000 tenaga non-ASN di Makassar yang telah lulus seleksi PPPK dan akan digaji oleh pemerintah pusat. Namun, Pemkot Makassar masih mengalokasikan anggaran untuk 12.000 tenaga non- ASN.

Ia pun meminta agar sisa anggaran dari tenaga yang sudah lulus PPPK dialihkan untuk meningkatkan honorarium tenaga non-ASN yang belum berkesempatan lolos seleksi.

"Tenaga yang lulus PPPK akan digaji pusat, jadi otomatis ada anggaran yang tersisa. Sisa anggaran ini bisa dialihkan untuk menambah gaji tenaga non-ASN yang belum terangkat. Kami berharap hal ini menjadi perhatian serius
bagi Pak Appi dan Bu Aliyah," ujar Ruslan, yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Jumat (24/1).

Ruslan menilai bahwa saat ini tidak mungkin bagi Pemkot Makassar untuk kembali merekrut tenaga honorer baru. Oleh karena itu, fokus pemerintah seharusnya tertuju padan peningkatan kesejahteraan tenaga non-ASN yang masih bekerja.

"Sisa anggaran yang tersedia harusnya digunakan untuk menambah honor mereka,
termasuk Laskar Pelangi. Gaji mereka sekarang hanya sekitar Rp1,3 juta, dan kami berharap bisa dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta," pinta Ruslan.

Selain itu, Ruslan juga menyebutkan rencana penerimaan PPPK tahap kedua yang dijadwalkan pada April mendatang. Ia berharap lebih banyak tenaga non-ASN yang dapat terserap dalam seleksi tersebut.

Namun, bagi mereka yang belum lolos, peningkatan gaji menjadi solusi sementara untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

"Kami terus mendorong agar sisa anggaran
ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan gaji tenaga non-ASN. Intinya, kami ingin tenaga non-ASN yang belum berhasil lolos PPPK tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah," ujarnya.

Desakan ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah kota untuk mengutamakan
kesejahteraan tenaga non-ASN, yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di Makassar.

Rachmat Taqwa Kembali Umrahkan Konstituen

KETUA Fraksi PPP DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Qurais mengawali tahun 2025 dengan sejumlah agenda kebaikan. Salah satunya dengan memberangkatkan konstituennya ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmennya untuk memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat, serta sebagai wujud kepedulian terhadap mereka yang telah mendukungnya selama ini.

Aksi sosial ini bukanlah hal baru bagi Rachmat. Sejak menjadi anggota DPRD Kota Makassar pada tahun 2019, ia rutin melaksanakan program umrah bagi konstituennya.

Setiap tahun, ia berusaha untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan untuk merasakan keindahan ibadah umrah di tanah suci.

"Tahun lalu sudah diberangkatkan dua orang konstituen saya, dan Insya Allah pada 15 Januari tahun ini, saya akan memberangkatkan lagi satu orang," katanya di Makassar, Minggu (5/1/2025).

Salah satu yang berkesempatan tahun ini adalah Dg. Roneng, yang merupakan salah satu Ketua RT di Kelurahan Camba Berua.

Rachmat menambahkan, bahwa selain Dg. Roneng, ia juga akan memberangkatkan dua orang lagi pada tahun ini, yang merupakan pemenang undian pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun lalu.

"Ini sebagai bentuk apresiasi saya kepada masyarakat yang telah aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial," tuturnya.

Menurut Ketua Angkatan Muda Kakbah (AMK) Sulsel ini, pemberangkatan umrah ini tidak hanya sebagai wujud kebahagiaan pribadi bagi para konstituen yang terpilih, tetapi juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan masyarakat.

Dengan menjalankan ibadah umrah, diharapkan mereka akan mendapatkan berkah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Melalui program umrah ini, Rachmat berharap bisa menginspirasi lebih banyak pihak untuk melakukan hal yang sama, membawa kebaikan bagi masyarakat, dan terus mendukung keberlanjutan program-program sosial yang bermanfaat. Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi konstituennya, terutama dalam halhal yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka secaraspiritual dan sosial.

Tahun Baru Imlek 2025, Ketua DPRD Makassar Ajak Perkuat Toleransi Antar Umat

SEGENAP pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2025 yang akan diperingati oleh masyarakat Tionghoa pada 29 Januari 2025. "Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2025! Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan sepanjang tahun ini," tulis DPRD Makassar lewat unggahannya di Instagram @dprd_makassar, Selasa, 28 Januari 2025.

Andi Suhada Apresiasi Program MBG

MAKAN BERGIZI. Sejumlah murid di salah satu SD di Makassar menikmati program Makan Bergizi Gratis.

ANGGOTA Komisi D DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile, menyampaikan apresiasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program yang bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis kepada anakanak
sekolah ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesehatan
dan kecerdasan generasi muda.

"Program ini sangat bagus, meskipun masih dalam tahap uji coba. Harapan kita semua semoga pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," ujar Andi Suhada, Kamis (9/1/2025).

Ketua DPC PDIP Makassar ini menjelaskan bahwa program tersebut memiliki potensi besar untuk mengurangi angka kekurangan gizi pada anak sekaligus mendukung tumbuh kembang mereka dengan asupan makanan sehat.

Menurutnya, kesehatan anak-anak sejak usia dini sangat penting sebagai fondasi masa depan yang lebih baik.

Selain itu, Andi Suhada menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Ia berharap pelaksanaan MBG dapat dilakukan dengan pengawasan ketat sehingga tujuan utama program tercapai.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 ribu per porsi makanan, Andi Suhada menyoroti pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas makanan.

Menurutnya, meskipun anggaran tersebut terbilang terbatas, yang terpenting adalah memastikan makanan yang disajikan tetap bergizi dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

"Selama nilai gizinya sudah seimbang dan tidak ada pengurangan kualitas, anggaran Rp10 ribu masih bisa memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah," tutupnya.

Komis C Sidak Ruko tak Berizin di Bulusaraung

BANGUNAN atau tidak berizin menjadi sorotan Komisi C DPRD Kota Makassar. Ini ditandai dengan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan terhadap salah satu bangunan di Jalan Bulusaraung Selasa (14/1/2025) yang dinilai membahayakan.

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Aswar Rasmin, mengungkapkan bahwa bangunan tersebut pernah disidak pada tahun 2017 dan telah dilarang pembangunannya karena melanggar izin.

Memang benar, ruko tersebut sebelumnya sudah pernah disidak pada tahun 2017, dan saat itu pembangunannya sudah dilarang karena tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ruko yang awalnya dirancang untuk 3 lantai justru ditambah menjadi 7 atau bahkan 8 lantai, sehingga melampaui izin dan peruntukan awalnya," kata Aswar.

Legislator dari Fraksi PKS ini juga mengaku banyak menerima keluhan masyarakat yang khawatir akan dampak dari keberadaan bangunan tersebut.

"Kondisi ini jelas membahayakan masyarakat sekitar, terutama jika terjadi insiden. Kami juga mengusulkan agar pembangunan dihentikan sementara, dan bangunan tersebut disegel," tambahnya.

Aswar juga menyoroti bahwa bangunan tersebut tidak memiliki IMB maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, warga sekitar diketahui menolak keberadaan bangunan tersebut dan mengeluhkan dampak negatifnya.

"Warga bahkan mempertanyakan bagaimana bangunan yang awalnya hanya 3 lantai bisa berubah menjadi 7 lantai tanpa izin yang jelas. Kami menduga ada kelalaian atau bahkan kongkalikong dalam pengawasan oleh Dinas Tata Ruang," tegas Aswar.

Ia juga meminta Dinas Tata Ruang untuk bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang di tempat lain. "Tindakan yang harus diambil adalah menghentikan pembangunan dan menyegel bangunan tersebut," ujarnya.

"Jika pemilik tidak mematuhi arahan seperti menghentikan pembangunan atau mengambil langkah perbaikan sesuai aturan, kami tidak akan segan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut," tutupnya.

Anggota Komisi A Soroti Maraknya Tenant di Pasar Segar yang Gunakan Fasum

Karena masyarakat tidak lagi takut untuk berkunjung ke sana karena lahan parkir sudah luas. “Itu kan sekarang tidak ada lahan parkir. Harusnya itu tenant ditiadakan sehingga pedagang bisa aktif kembali. Karena memang di sana itu tidak ada lahan parkir Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Nasir Rurung menyoroti maraknya tenant atau penyewa di Pasar Segar yang berdiri di atas fasilitas umum (fasum) milik Pemkot Makassar.

Pasar Segar tersebut terletak di Pengayoman, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Dulu, Pasar Segar selalu ramai pengunjung. Bahkan menjadi salah satu tempat nongkrong anak muda.

Hanya saja saat ini, Pasa Segar selalu sepi pengunjung. Nasir Rurung menilai, sepinya Pasar Segar akibat ruang parkir kendaraan semakin berkurang. Karena banyak tenant yang menggunakan fasum.

“Makanya kenapa itu Pasar Segar dia begitu seperti pedagangnya mati. Karena adanya oknum membangun tenanr di fasum. Sehingga tidak ada lahan parkir,” ujar politisi PAN Makassar itu.

Nasir Rurung berharap hal ini menjadi perhatian Pemerintah agar bisa menertibkan tenant yang berdiri di atas fasum. Agar Pasar Segar kembali hidup. Sebab dengan begitu, pedagang aktif kembali menjajakan makanan.

Nasir Rurung sendiri tak mengetahui siapa pemilik sejumlah tenant di Pasar Segar. Terlepas dari itu, dia berharap ada upaya penertiban, khususnya tenan yang menggunakan fasum.

“Itu saya tidak tahu siapa yang bangun tenan-tenan di Pasar Segar sehingga pasar segar seperti pasar mati di dalam karena kurang lahan parkirnya. Karena itu fasum-fasos dibangun tenan-tenan,” ujarnya.

“Termasuk jalanan dari luar itu tadinya ada dua jalur sekarang tinggal satu jalur karena dibuatkan tenant. Ini masalahnya di Pasar Segar ini harus dihilangkan itu tenant supaya kembalikan fasum itu pada fungsinya,” keluh Nasir.

Nasir Rurung menegaskan, fasum dan fasos harus kembali pada fungsinya masing-masing sebagai lahan parkir di Pasar Segar. Bukan menjadi tempat berdirinya tenan.

“Sehingga los-los dan kios pedagang dari luar masuk kembali sehingga bisa ramai kembali itu pasar segar. Kita tahu dulu itu pasar segar ramai. Sampai kehadiran tenan-tenan tidak ada lahan parkir,” tutupnya.

RDP Komisi D Bahas Dapodik

KOMISI D DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait 1.377 siswa yang tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di 16 sekolah menengah pertama, Kamis (23/1/2025).

Rapat dipimpin Ketua Komisi D Ari Ashari Ilham didampingi sejumlah anggota Komisi D lainnya, Muchlis Misbah, Eshin Usami Nur Rahman, A Odhika Cakra Satriawan, Fahrizal Arrahman Husain, dan Yulius Patandianan.

Plt Kadis Pendidikan Nielma Palamba mengungkapkan, pihaknya terus berupaya membangun komunikasi untuk bernegosiasi memberi pemahaman kepada pusat data dan informasi (Pusdatim) Kementerian Pendidikan di Jakarta terkait dengan 1.377 siswa SMP yang tidak terdaftar di DAPODIK tahun 2024.

"Dan Alhamdulillah dengan berbagai pertimbangan karena kita juga ingin menyelamatkan anak-anak kita, Pusdatim memberi solusi segera melakukan langkah-langkah teknis, by name, by address, by NIK dan asal sekolah siswa tersebut. Itu bertahap akan kami kerjakan mengumpulka data data itu di masing masing sekolah," papar Nielma.

"Intinya pusat telah memberi solusi, solusi itu tentunya dibarengi dengan dokumen-dokumen teknis yang berasal dari 16 sekolah itu. Sampai akhir Januari ini, jadi kita masih ada waktu 2 Minggu menyelesaikan permasalahan ini," lanjut Nielma.

Nielma mengaku, penyebab 1.377 siswa SMP tidak terdaftar di DAPODIK dikarenakan melebihi kapasitas pada saat penerimaan siswa baru tahun 2024. "Mungkin di input secara offline bukan secar online. Tapi kita fokus ke solusi, kalau penyebabnya biarlah itu masa lalu supaya tidak terulang lagi. Kita upayakan selesai akhir Januari sebelum Februari diusahakan selesai," bebernya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar Ari Ashari Ilham mengapresiasi kerja keras dari Dinas Pendidikan Makassar dalam menyelesaikan masalah ini dan memastikan data Dapodik 1.377 siswa lengkap dalam waktu dekat.

"Apresiasi terhadap Dinas Pendidikan karena sudah bekerja keras, dan singkat untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada di Kota Makassar, Insyaallah janji dari Dinas Pendidikan bahwa 3 hari ke depan sudah mulai dimunculkan ADD anak-anak kita di Dapodik sehingga ini akan selesai 100%," kata Ari Ashari.

Selain itu, Politisi Partai NasDem ini juga berharap pentingnya solusi untuk menampung siswa yang berlebih. Dari tahun ke tahun, jumlah siswa terus meningkat sementara jumlah sekolah SD 315 sekolah jauh lebih banyak dibandingkan SMP hanya 55 sekolah.

Komisi A Minta Pemkot Akomodir Seluruh Tenaga Non-ASN

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera merumuskan Formasi rekrutmen non-ASN. Desakan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi A, pada Rabu (15/01/2025)

Diketahui Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi A DPRD Kota Makassar, merupakan tindaklanjut aspirasi dari pihak Barisan Muda Kesehatan Indonesia Perihal Status Kepegawaian dan Kesejahteraan Tenaga Non-ASN Kesehatan Kota Makassar.

Rapat tersebut menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian, Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar. "Kami minta dirumuskan formulasi kebijakan yang mengakomodir seluruh tenaga Non-ASN Pemerintah Kota Makassar, baik itu Kesehatan, Pendidikan, ataupun teknis," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, A Pahlevi di rapat tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber, Pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan terbaru terkait penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, kebijakan ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak lulus tes namun datanya sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Meskipun aturan baru diberlakukan, namun-masih ada tenaga non-ASN yang belum masuk. Khususnya bagi mereka yang masa kerja di bawah 2 tahun, tidak lulus tes CPNS maupun PPPK tahap 1 dan 2, serta tidak terdaftar di database BKN.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/239/M.SM.01.00/2025 Perihal Penjelasan Pengadaan PPPK, disebutkan bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya, wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan pegawai non ASN tahun 2024, dalam beberapa langkah.

Pertama, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai nonASN BKN dapat melamar pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2.

Kedua, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non ASN BKN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, apabila memenuhi ketentuan, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap 1 atau tahap 2, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan

RDP KOMISI A DPRD MAKASSAR DENGAN BPSDM TERKAIT KESEJAHTERAAN HONORER DAN NON-ASN

TAMBAH SEKOLAH. Komisi D DPRD Makassar merekomendasikan penambahan jumlah SMP negeri di Makassar guna menambah kuota siswa baru.

Wacana Penambahan SMP Negeri

DPRD Makassar mengusulkan pembangunan SMP baru imbas 1.323 siswa tidak terdaftar di sistem data pokok pendidikan (dapodik). Rekomendasi itu diharapkan bisa mengatasi permasalahan overkapasitas rombongan belajar (rombel) yang menjadi pemicu masalah dapodik tersebut.

"Rekomendasinya kami adalah mencarikan solusi apakah membangun SMP baru ataukah membuat sistem seperti misalnya di SD-nya dipakai jam pagi, kemudian SMP-nya dipakai jam siang, regrouping namanya," ucap Ketua Komisi D DPRD Makassar Ari Ashari Ilham kepada detikSulsel, Sabtu(25/1/2025). Ari menjelaskan ribuan siswa yang tidak masuk dapodik karena siswa yang diterima saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) lewat 'jalur solusi' yang terlalu dipaksakan hingga melebihi kuota rombel yang ideal. Sementara lulusan SD yang akan diterima di SMP negeri tidak sebanding.

"Harus masyarakat semua tahu di Makassar itu ada 351 SD negeri, sementara SMP negerinya itu cuma ada 55. Jadi memang setiap tahun kalau tidak ditambah ruang kelas baru untuk tingkat SMP akan berlanjut seperti ini terus," tuturnya.

Pihaknya menyadari kebijakan Disdik Makassar saat itu agar semua siswa lulusan SD bisa tetap bersekolah di SMP negeri. Namun langkah tersebut belakangan bermasalah karena melabrak aturan kuota rombel yang ditetapkan.

Pihkanya berharap Pemerintah Kota berupaya menambah jumlah SMP Negeri dan menyetarakan kualitas sekolah agar orang tua tidak pilih-pilih sekolah dan memilih yang terdekat dengan rumah.

“Sebenarnya tidak ada yang salah sebenarnya pemerintah kota berupaya juga mengakomodir seluruh anak harus sekolah, dari sisi Kementerian juga membatasi rombelnya, sehingga memang tugas berat dari pemerintah kota Makassar adalah menambah jumlah SMP Negeri di Kota Makassar, dan menyetarakan seluruh sekolah yang ada di kota Makassar supaya orang tua murid itu tidak pilih-pilih sekolah,” tandas Ari Ashari.

Danny Pomanto: Itu Jika Dana Transfer

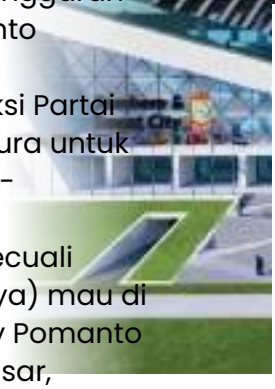

WALI KOTA MAKASSAR, Moh Ramdhan Pomanto menanggapi pernyataan anggota DPRD Makassar untuk menunda lelang proyek fisik tahun anggaran 2025. Danny Pomanto mempertanyakan apa dasar dari Fraksi Partai Demokrat dan Hanura untuk menunda program-program di 2025.

"Dasarnya apa, kecuali kalau dia (proyeknya) mau di tunda," ucap Danny Pomanto di Balai Kota Makassar, Senin (20/1/2025).

Jika terkait surat edaran menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) edaran itu kata Danny hanya untuk anggaran yang bersumber dari dana transfer pusat untuk daerah. Sementara untuk program yang sumber anggarannya dari APBD tetap harus dijalankan.

"Dana transfer daerah itukan jelas sekali sifatnya, terus apa mau kau belanja nanti mau bayar petugas sampah, masa tidak ada jalan (program)," tegasnya.

Danny mengatakan, sekarang ini sudah ada beberapa proyek fisik yang sedang dipersiapkan. Salah satunya Makassar Government Center (MGC) yang sudah masuk tahapan lelang Manajemen Konstruksi (MK) untuk tahap 2.

"Sementara (persiapan lelang proyek) itu pun masih di siapkan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi Partai Mulia (gabungan Demokrat dan Hanura) meminta agar seluruh perangkat daerah Kota Makassar menunda lelang fisik di 2025.

Proyek fisik diharapkan dilaksanakan setelah pelantikan wali kota terpilih, 2025-2030

MGC. Gedung Makassar Government Centre (MGC) Makassar, salah satu infrastruktur yang menjadi prioritas pemkot Makassar.

Dewan Minta Pemkot Makassar Peduli Perkembangan Pelaku Usaha demi Peningkatan PAD

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono meminta Pemkot Makassar untuk selalu memperhatikan kondisi para pelaku usaha. Karena mereka adalah pihak yang memberikan kontribusi untuk PAD.

"Perusahaan ini kan semakin tumbuh usaha tentu pajaknya mereka juga semakin tumbuh. Makanya kita mendorong pemerintah harus memberikan kemudahan pada pelaku usaha agar tumbuh," ujarnya.

Hartono menegaskan, menarik pajak besar dari pelaku usaha untuk PAD tidak akan jadi masalah jika mereka juga mengalami pertumbuhan signifikan. Olehnya itu sangat penting bagi Pemkot untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan usahanya.

"Tapi kalau usahanya tidak tumbuh kemudian dihantui oleh pajak yang besar itu kan menghambat semua. Tugas kita pemerintah adalah bagaimana memberikan kesejahteraan pada masyarakat kita, memberikan kesempatan berusaha yang sebaiknya," ujarnya.

Hal penting yang juga harus menjadi perhatian Pemkot Makassar adalah mengefektifkan sumber-sumber pendapatan pemerintah termasuk BUMD. Hartono meminta Pemkot Makassar mencegah kebocoran.

"Saya beberapa hari kemarin PD Parkir misalnya karena adanya dorongan untuk memperbesar penerimaan dari retribusi parkir ini kemudian hampir semua tempat mau dikenakan tarif parkir. Harusnya tidak serta merta begitu," ujarnya.

"Harus ada sosialisasi. Karena kita berkepentingan agar semua usaha-usaha di Kota Makassar ini bisa tumbuh. Kalau belum apa-apa dihajar dengan retribusi dengan alasan memperbesar PAD itu juga keliru," tegas Hartono.

Hartono sepakat jika kita berkepentingan untuk memperbesar PAD. Namun yang paling utama adalah memberikan ruang yang kondusif dan luas pada masyarakat untuk bisa berusaha. Kemudian memberikan kemudahan berusaha agar usahanya tumbuh dengan baik.

"Ketika tumbuh ujungnya berimplikasi pada PAD Kota Makassar. Selain itu efektivitas pencegahan kebocoran. Pastikan terjadi transparansi dalam penerimaan dari sektor yang ada terutama yang berkontribusi untuk PAD, terutama BUMD," tutupnya.

Legislator Hanura Soroti Krisis Lahan Pemakaman

ANGGOTA DPRD Makassar, Muchlis Misbah menyoroti persoalan lahan pemakaman di Kota Makassar yang mengalami krisis lahan. Politisi Partai Hanura itu menilai sudah perlu ada tambahan lahan pemakaman baru.

Penambahan lahan pemakaman di tahun 2025 perlu dilakukan mengingat pekuburan yang ada saat sudah mencapai kapasitas maksimal untuk menerima penguburan jenazah baru.

Oleh karena itu, Muchlis Misbah berharap Wali Kota Makassar terpilih melakukan perencanaan penambahan lahan makam baru di Kota Makassar.

"Tempat pemakaman umum (TPU) yang ada saat ini sudah mencapai kapasitas maksimum untuk menampung jenazah. Kita berharap Walikota terpilih melalui dinas terkait segera melakukan perencanaan pemulihan lahan permakaman," kata Muchlis Misbah, Jumat, 3 Januari 2025.

Pihaknya juga mengungkapkan, enam lokasi tempat pemakaman umum yang ada saat ini yakni, Sudiang, Beroanging, Kampung Dadi, Panaikang (dua lokasi), dan Antang sudah hampir mencapai kapasitas maksimum bsehingga memang perlu menjadi perhatian untuk menjadi program prioritas pemerintah kota Makassar utamanya di kepemimpinan Wali Kota yang baru nantinya.

"Kami berharap Walikota terpilih untuk segera melakukan perencanaan pengadaan lahan permakaman baru menjadi salah satu program perioritas untuk direalisasikan untuk kepentingan warga Kota Makassar," papar Muchlis Misbah.

Di Hadapan Menko Zulhas, Danny Pomanto Bahas Ketahanan Pangan Makassar Melalui Food Security

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), di Aula Tudang Sipulung Rujab Gubernur, Jumat (17/1/2025).

Kegiatan tersebut membahas soal pangan. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Danny Pomanto, sapaan akrabnya, turut memaparkan soal upaya ketahanan pangan Pemkot Makassar melalui program Food security.

Menurutnya, salah satu pemicu terkendalinya inflasi di Kota Makassar berkat keterlibatan masyarakat dalam membangun food security mulai dari lorong.

"Kota inikan kalau di Global Foodhub pengaruhnya tidak terlalu kuat dari kabupaten. Tapi untuk Kota Makassar Food security kami sudah jalan dan kami menanam di lorong," kata Danny Pomanto.

Meski lahan pertanian di Kota Makassar terbatas, namun pemerintah kota tetap mengambil peran di dalam memperkuat ketahanan pangan.

Lewat Food security ini, Pemkot Makassar bersama masyarakat menanam berbagai komoditas di lorong. Program ini yang kemudian bertransformasi dari Lorong Garden menjadi Lorong Wisata.

Bahkan Pemkot Makassar menggandeng beberapa pihak untuk bekerja sama menyukseskan program tersebut. Termasuk Pemerintah Amerika Serikat yang turut mendukung Low Carbon.

"Kami vertikal farming, dan berlangsung hampir 10 tahun. Kami punya lorong itu bisa mengendalikan inflasi. Kalau pak Menko tadi lihat bagaimana cabai terkontrol itu dari dulu, karena kita tanam cabai di gang (lorong)," jelasnya.
Lebih lanjut, Danny Pomanto menyebutkan jumlah Lorong Wisata di Kota Makassar saat ini mencapai 2 ribu lebih. "Walaupun ini 100% dari APBD, tapi saya kira ini bisa menjadi sebuah inspirasi sebuah kota untuk global foodhub di Indonesia," tutupnya.

Sekretariat Gelar Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025 di ruang rapat gedung DPRD Makassar.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Makassar, H. Dahyal, dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan menyusun strategi kerja yang lebih efektif di tahun 2025. Senin (06/01/2025).

Selain itu, rapat ini juga menjadi forum strategis untuk menyusun langkah-langkah kerja yang lebih efektif dan efisien guna mendukung kinerja DPRD Kota Makassar di tahun 2025.

Dalam sambutannya, H. Dahyal menekankan pentingnya sinergi antarunit kerja dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi dan dukungan terhadap kegiatan legislatif.

"Saya juga mengajak seluruh jajaran sekretariat untuk berkomitmen dalam meningkatkan profesionalisme serta inovasi dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujarnya.

Melalui Rapat Koordinasi Awal Tahun ini, Sekretariat DPRD Kota Makassar berharap dapat semakin memperkuat peran dan fungsinya dalam mendukung DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, serta memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat dan pemerintahan Kota Makassar.

SUPRATMAN

Bermula dari Bawah, Menjulang ke Puncak

Supratman, Ketua DPRD Kota Makassar Periode 2024-2029 adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan dedikasi mampu mengubah nasib seseorang. Ia tidak berasal dari kelompok masyarakat kelas atas.

Sebaliknya, perjalanan hidupnya dimulai dari bawah, bahkan sebagai pegawai kontrak di kantor kecamatan. Namun, dengan tekad yang kuat, ia berhasil menduduki kursi dewan hingga tiga periode berturut-turut, sebelum akhirnya dipercaya Partai NasDem sebagai Ketua DPRD Kota Makassar.

Lahir dari keluarga sederhana, Supratman tidak pernah membayangkan dirinya akan mencapai posisi yang ia miliki sekarang. Dalam berbagai kesempatan, ia dengan bangga menceritakan perjalanan kariernya yang berawal sebagai pegawai kontrak.

“Saya dulu cuma pegawai kontrak yang kerja di kantor camat. Sekarang, Alhamdulillah, bisa menjadi seorang anggota DPR,” ungkapnya.

Supratman tidak pernah merasa malu dengan latar belakangnya. Sebaliknya, ia justru menjadikannya sebagai motivasi. “Saya tidak pernah malu, riya, dan ciut lahir dari masyarakat dan orang tua yang lahir dari ekonomi menengah ke bawah. Itu bukan kesalahan orang tua saya. Itu kesalahan saya kalau saya tidak bisa bangkit,” tegasnya.

Kerja Sosial Jadi Kunci Sukses

Salah satu prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Supratman adalah pentingnya kerja sosial. Ia percaya bahwa melayani masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap pemimpin.

“Meski saya dari kalangan yang biasa-biasa saja tapi saya bisa bangkit. Intinya Perbanyak kerja sosial, dan Tuhan serta rakyat pasti akan membalas,” ujar Supratman.

Prinsip ini ia terapkan tidak hanya dalam karier politiknya tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, keberhasilan tidak hanya diukur dari jabatan yang diraih, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan perjalanan yang penuh liku dan kerja keras yang konsisten, Supratman telah menjadikan dirinya sebagai contoh nyata bahwa kesederhanaan asal-usul bukanlah penghalang untuk mencapai puncak kesuksesan.

Fokus Sejahterakan Rakyat

Supratman yang maju di daerah pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kecamatan Manggala dan Panakkukang itu meraih 8.786 suara pada Pileg 2024 lalu. Capaian ini membuatnya kembali duduk sebagai anggota dewan tiga periode.

Tiga periode menjabat sebagai anggota dewan adalah bukti nyata komitmennya dalam melayani rakyat. Dukungan dari masyarakat menjadi landasan kuat yang mengantarkannya ke posisi puncak.

Sebagai Ketua DPRD Makassar , Supratman menyatakan akan melanjutkan tongkat estafet dari periode sebelumnya. Dia menyatakan akan berupaya semaksimal mungkin mengemban amanah demi kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh beliau. Kami kembangkan dengan segala kreativitas dsn inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan san kemajuan zaman," ujarnya.

Dia pun mengajak anggota DPRD Makassar terpilih untuk membangun kolaborasi. "Kami mengajak kepada seluruh anggota DPRD Makassar, mari kita meningkatkan kinerja dengan Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju," tutup Supratman.

Data Diri

Nama	: Supratman
Jabatan	: Ketua DPRD Kota Makassar periode 2024-2029
Partai	: NasDem
Tempat, Tanggal Lahir	: Makassar, 24 Mei 1979
Alamat	: Jl. Antang Raya No. 12A
Status Perkawinan	: Nikah
Pendidikan	: SMA

DPRD Larang Pelajar SMP Bawa Motor ke Sekolah

ANGKA kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di kalangan pelajar terbilang tinggi. Karenanya, DPRD Makassar meminta Dinas Pendidikan mengambil langkah pencegahan.

Salah satunya dengan melarang siswa membawa sepeda motor sendiri ke sekolah. DPRD menyebut, langkah ini juga harus didukung orang tua.

Sekretaris Komisi D, Fahrizal Arrahman Husain, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) segera mengambil langkah tegas.

Fahrizal menyarankan agar Disdik mewajibkan orang tua murid menandatangani surat perjanjian yang melarang siswa membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Menurutnya, kebijakan ini dapat diterapkan saat proses penerimaan siswa baru, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Kami menyarankan Disdik untuk membuat dan memberikan surat perjanjian kepada orang tua murid saat penerimaan siswa baru di SMP. Surat tersebut akan memastikan siswa tidak membawa kendaraan bermotor, mulai dari awal masuk hingga lulus," kata Fahrizal, Senin, 27 Januari 2025.

Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran hukum terkait penggunaan kendaraan oleh anak di bawah umur.

"Penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa di bawah umur melanggar aturan izin berkendara dan sangat berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Ini harus dicegah," tegasnya.

Fahrizal juga menyoroti aspek keamanan lainnya. Menurutnya, pelarangan ini dapat mengurangi risiko pencurian kendaraan bermotor yang kerap terjadi akibat siswa memarkir kendaraan di tempat yang tidak aman.

"Selain kecelakaan, masih banyak siswa yang memarkir motornya sembarangan. Ini meningkatkan risiko pencurian," pungkasnya. (tim)

NAIK MOTOR. Sejumlah pelajar SMP sudah berkendara motor ke sekolah sekalipun belum memiliki Surat Izin Mengemudi.

Awasi Pendatang Baru Pasca Libur Nataru

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghadapi arus pendatang baru masuk dan menetap di kota Makassar pasca libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurut anggota DPRD Makassar, Irfan Malluserang, pendatang baru atau urbanisasi yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai persoalan sosial, termasuk peningkatan angka kejahatan yang bisa saja terjadi di tahun 2025 ini jika tidak ditanggulangi sejak dini.

"Kita tidak bisa pungkiri banyak pendatang datang ke Makassar untuk berlibur dan merayakan tahun baru 2025 di Makassar. Ada yang datang tanpa bekal pekerjaan atau keterampilan, kondisi ini tidak hanya menambah angka pengangguran, tetapi juga menjadi beban tambahan bagi pemerintah kota," ungkapnya, Kamis (2/1).

Olehnya itu, legislator Partai PAN Makassar ini menekankan perlunya langkah serius untuk menangani situasi ini "Penduduk asli Makassar saja masih banyak yang menganggur. Jika mereka datang tanpa pekerjaan, lalu bergantung pada bantuan pemerintah, itu akan semakin memperberat beban yang sudah ada," katanya.

Irfan juga menyoroti peran vital camat, lurah, hingga ketua RT dan RW dalam melakukan pendataan warga. Ia mengingatkan bahwa perangkat daerah memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan wilayah mereka tetap tertata. "Saya selalu sampaikan di musrenbang atau pertemuan lainnya bahwa RT dan RW, yang digaji pemerintah, seharusnya tahu siapa saja warganya, termasuk pendatang yang baru menetap," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Makassar lainnya, Ruslan Lallo, menambahkan bahwa arus urbanisasi perlu dikendalikan untuk dua tujuan utama yakni menekan angka kriminalitas dan mengurangi beban pemerintah. Menurutnya, urbanisasi yang tidak terkelola sering kali menjadi pemicu tindak kejahatan, seperti pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, hingga pencurian.

"Tingginya arus urbanisasi seringkali berbanding lurus dengan meningkatnya angka kejahatan. Ini karena banyak pendatang datang tanpa pekerjaan tetap, yang akhirnya mendorong mereka ke jalur kriminal akibat desakan ekonomi," jelasnya.

Legislator Fraksi NasDem Makassar ini juga mengingatkan bahwa tren urbanisasi biasanya meningkat pada awal tahun, saat banyak orang yang awalnya hanya berlibur memutuskan menetap di Makassar.

"Ada pula yang pulang kampung saat liburan, kemudian kembali ke Makassar dalam kondisi menganggur setelah di-PHK. Ini memunculkan persoalan sosial baru,"bebernya.

Ia menegaskan, kebijakan terkait urbanisasi tidak dimaksudkan untuk mengusir pendatang, tetapi lebih kepada mengelola dan mendata mereka dengan baik.

"Urbanisasi itu penting, tapi harus ada pengelolaan yang jelas agar dampaknya bisa diminimalisir," tuturnya.

Dukung Polisi Selidiki Kebakaran Kantor Dinas Pendidikan

WAKIL Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya insiden kebakaran Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar. Anwar Faruq pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan secara transparan guna mengusut tuntas insiden tersebut.

"Kejadian ini sangat memprihatinkan, terlebih karena menyangkut salah satu instansi penting yang memberikan layanan dasar kepada masyarakat, yaitu pendidikan," kata Anwar Faruq, Minggu, 12 Januari 2025.

Anwar juga menyoroti perlunya evaluasi standar keamanan di seluruh fasilitas publik. Menurutnya, musibah seperti ini bisa dicegah jika ada langkah mitigasi yang memadai, seperti pemasangan sistem deteksi dini kebakaran dan simulasi tanggap darurat secara berkala di setiap instansi pemerintah.

"Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting agar seluruh OPD di Kota Makassar lebih memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan gedung, sehingga risiko serupa bisa diminimalkan di masa depan," tuturnya.

Sebelumnya, musibah kebakaran hebat melanda Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Sabtu dini hari, 11 Januari 2025.

Api yang berkobar sejak pukul 02.16 WITA menghancurkan sebagian besar gedung, mengakibatkan gangguan serius terhadap operasional dinas yang bertanggung jawab atas pendidikan di kota ini.

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto, segera merespons dengan memerintahkan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Nielma Palamba, untuk memindahkan aktivitas operasional ke tempat yang lebih layak.

"Kami akan segera mengonsolidasikan seluruh pemerintah kota. Ada bangunan yang bisa digunakan.

PUING. Puing-puing sisa kebakaran kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar. DPRD Makassar dukung polisi mengusut kejadian ini.

Dispar dan Disbud Diminta Tingkatkan Promosi Kebudayaan

KETUA Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham mendorong pihak terkait agar memaksimalkan promosi budaya Kota Anging Mammiri. Salah satunya melalui kerja sama antara Dinas Kebudayaan (Disbud) dan Dinas Pariwisata (Dispar).

"Sebenarnya saya sudah beberapa kali meminta di forum (DPRD Makassar) bahwa Dinas Kebudayaan harus bekerja sama dengan Dinas Parawisata dan itu tidak bisa dipisahkan," terangnya kepada SINDO Makassar, Jumat (31/1/2025).

"Jadi harus ada kolaborasi antara dua dinas ini, sehingga kebudayaan itu dibantu promosi oleh Dinas Parawisata," sambungya.

Ari juga menekankan bahwa promosi kebudayaan Kota Makassar harus direncanakan dengan sempurna agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan dengan tepat.

"Percuma kita (Pemkot Makassar) misalnya mengeluarkan atau menggelontorkan uang untuk melestarikan cagar budaya, kalau tidak dipromosikan dengan baik, itu kan percuma juga," keluhnya.

"Maksudnya itu, hanya menjadi objek budaya diketahui pemerintah kota saja, tetapi tidak dietahui masyarakat Makassar, secara nasional hingga mancanegara," imbuhnya.

Legislator Partai Nasdem ini berharap agar Dinas Kebudayaan dan Dinas Parawisata bisa meningkatkan kerja sama lagi untuk mempromosikan budaya lokal Kota Makassar.

"Sehingga apapun program-program yang misalnya direncanakan oleh Dinas Kebudayaan harus disinkronisasi ke Dinas Parawisata untuk dibantu promosi," ungkapnya saat dihubungi via telepon WhatsApp.

"Intinya banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi destinasi wisata di Kota Makassar, baik wisata budaya atau wisata objek-objek seperti pantai dan lainnya," tutupnya. (tim)

Optimis Tuntaskan 15 Ranperda Tahun 2025

BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan 15 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang menjadi prioritas tahun 2025. Dengan target ambisius mencapai 90 persen penyelesaian, Bapemperda optimistis mampu menuntaskan agenda legislasi yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Makassar.

Ketua Bapemperda DPRD Makassar, Basdir, mengungkapkan bahwa optimisme ini didukung oleh semangat dan komitmen para anggota Bapemperda yang telah memetakan program dengan lebih realistis. "Kita menargetkan 90 persen Ranperda bisa selesai di tahun 2025. Insyaallah, dengan kerja sama yang solid, target ini akan tercapai," ujarnya saat ditemui pada Senin (6/1/2025) malam.

Dari total 20 Ranperda yang sempat diusulkan, Bapemperda akhirnya menetapkan 15 Ranperda yang dianggap paling mendesak. Beberapa di antaranya bahkan masuk kategori wajib, seperti Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Awalnya, ada sekitar 20 Ranperda yang diusulkan. Namun, setelah diseleksi dengan mempertimbangkan waktu dan kapasitas, kita tetapkan 15 Ranperda sebagai prioritas. Langkah ini diambil agar kita lebih fokus dan hasilnya maksimal," jelas Basdir.

Menariknya, dari 15 Ranperda tersebut, beberapa merupakan usulan yang sebelumnya belum sempat diselesaikan pada tahun 2024. Misalnya, dari 25 Ranperda yang diajukan pada 2024, hanya empat yang berhasil disahkan menjadi Perda, termasuk Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024– 2043 dan Perda Pengelolaan Limbah B3.

"Kami tetap mengakomodasi Ranperda yang belum selesai dari tahun lalu, karena ini juga penting bagi masyarakat. Namun, kami juga menambahkan Ranperda baru yang memang mendesak dan relevan untuk tahun 2025," tambahnya.

Proses penetapan program legislasi daerah (Prolegda) ini tidak lepas dari perdebatan internal. Basdir mengakui, ada perbedaan pandangan di antara anggota Bapemperda terkait jumlah Ranperda yang akan dibahas. Namun, ia menegaskan perlunya realisme agar pengalaman tahun sebelumnya tidak terulang.

"Kalau usulan terlalu banyak tapi tidak terealisasi, apa dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat? Karena itu, kita lebih realistis kali ini, fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas," ungkap Basdir. Terkait persiapan teknis, Basdir memastikan bahwa anggota Bapemperda dan komisi-komisi terkait telah siap melaksanakan pembahasa Beberapa Ranperda yang melintasi tahun sebelumnya bahkan sudah memiliki naskah akademik.

1. Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Pemerintah Kota Makassar – BPKAD)
2. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Pemerintah Kota Makassar – BPKAD)
3. Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Pemerintah Kota Makassar – BPKAD)
4. Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Pemerintah Kota Makassar – Dinas Pariwisata)
5. Rancangan Perda tentang Pembentukan Perumda RPH Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar – BRIDA dan Bagian Perekonomian)
6. Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Pemerintah Kota Makassar – BAPPEDA)
7. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda No.7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (Pemerintah Kota Makassar – Bagian Perekonomian)
8. Rancangan Perda tentang Re
ncana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkun
gan Hidup (Pemerintah Kota Makassar – Dinas Lingkungan Hidup)
9. Rancangan Perda tentang Kearsipan (Komisi A DPRD Kota Makassar)
10. Rancangan Perda tentang Pengelolaan Parkir di Kota Makassar (Komisi B DPRD Kota Makassar)
11. Rancangan Perda tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (Komisi C DPRD Kota Makassar)
12. Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Komisi C DPRD Kota Makassar)
13. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya (Komisi D DPRD Kota Makassar)
14. Hak Keuangan Perubahan Perda No.1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Bapemperda DPRD Kota Makassar)
15. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Bapemperda DPRD Kota Makassar).

Prabowo Ingin Penerapan e-Government Dipercepat

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid pada Senin, (13/1/2025) di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pertemuan ini khusus membahas program-program strategis Kementerian Komunikasi dan Digital. Termasuk program transformasi digital serta penerapan e-government pada ragam sektor pelayanan publik.

Meutya Hafid menerangkan, Presiden Prabowo sangat berharap proses digitalisasi berlangsung cepat di berbagai sektor Pemerintahannya. Hal ini perlu sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang efisien dan transparan.

“Sebagaimana kita tahu, Presiden sangat Concern dengan digitalisasi. Presiden ingin layanan-layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi.

”Kata Meutya dihadapan awak media selepas rapat di Istana Kepresidenan Jakarta (13/1/2025).

Selain itu, pertemuan tersebut turut membahas bagaimana program edukasi dan perlindungan anak dalam dunia digital. Sebab saat ini, situasi anak sangat rentan terhadap konten negatif dalam dunia cyber.

“Tapi tadi salah satunya membahas tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita di ranah digital.” Ungkap Menteri Komdigi.

Meutya Hafid menambahkan, Presiden Prabowo juga sangat memperhatikan isu soal anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sementara menyiapkan Peraturan Pemerintah serta kajian terkait perlindungan anak melibatkan DPR dalam penyusunan undang-undangnya.

“Pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajek, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak,” ujarnya.

“Lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR itu juga akan kita siapkan.” Tegas Meutya Hafid.

Presiden Prabowo Putuskan PPN 12 Persen Hanya Dikenakan pada Barang Mewah

Pemerintah resmi menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

Presiden Prabowo langsung menegaskan hal tersebut dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, (31/12/2024).

Kenaikan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

UU tersebut mengamanahkan bahwa kenaikan PPN dilakukan secara bertahap. Mulai dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022, kemudian menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025
.
“Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat. Terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ungkap Presiden dalam konferensi pers. (31/12/2024)

Pemerintah dalam mengambil kebijakan ini tetap berpegang pada kepentingan rakyat dan komitmen untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, setelah berkoordinasi dengan DPR, Presiden memutuskan bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya akan berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong mewah.
Beberapa contoh barang mewah antara lain jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah mewah yang nilainya melebihi kategori menengah.
Sementara itu, barang-barang yang tidak termasuk kategori mewah tidak akan mengalami kenaikan.

“Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, tidak ada kenaikan PPN. Yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku sejak Tahun 2022,” tegas Presiden.

Selain itu, kebijakan PPN 0 persen masih berlaku untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan selama ini memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Beberapa kebutuhan pokok tersebut antara lain beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum.

Kebijakan sistem perpajakan yang proporsional ini merupakan upaya dan komitmen pemerintah untuk menjaga kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

Oleh karena itu, komitmen pemerintah juga tetap konsisten terkait kebijakan stimulus di berbagai sektor senilai 38,6 triliun.

“Pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro-rakyat,” ujarnya.

EVA Pendakian Terakhir, Film yang Terinspirasi dari Kisah Nyata

Film terbaru berjudul 'EVA Pendakian Terakhir' akan hadir meramaikan bioskop XXI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 16 Januari 2025 mendatang.

Film yang memadukan elemen horor, drama emosional, dan budaya ini digarap oleh Sutradara Dedy Mercy, dan dibintangi Bulan Sutena beserta Kiesha Alvaro.

Film ini adalah karya kolaborasi dari rumah produksi Citra Visual Sinema (CVS) dan Titah Entertainment yang mengusung kisah tentang pendakian gunung yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat.

Film Eva Pendakian Terakhir terinspirasi dari Kisah Nyata yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Mengisahkan tentang Pendakian Gunung, namun berubah menjadi tragedi.

Eksekutif Produser Film Eva Pendakian Terakhir, Anwar Mattawape mengungkapkan bahwa film ini menggambarkan kumpulan kisah-kisah 'unik' yang pernah dialami oleh para pendaki maupun pegiat alam bebas.

"Penonton akan mendapat kisah dari pengalaman para pendaki itu, dan saya sangat yakin anda juga akan menemukan kisah yang pernah anda alami di film ini," ungkap Anwar Mattawape.

Selain menawarkan pengalaman sinematik yang memikat, film ini juga bertujuan menyampaikan pesan tentang pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap budaya lokal.

"Kami ingin kedepankan etik kultural. Hal-hal yang dianggap tabu sejatinya penting untuk menjaga ekosistem. Tujuannya agar kita tidak bertindak seenaknya," kata Anwar Mattawape yang juga merupakan aktivis pendaki di Sulawesi Selatan ini.

"Xontohnya orang haid dilarang mendaki. Ini penting sebab bau darah bisa mengundang binatang buas. Demikian pula kita tidak boleh kencing sembarangan. Selalu ada pesan penting dibalik semua larangan itu," jelasnya.

Pihaknya pun berharap, film ini tidak hanya menampilkan sisi hiburan, melainkan juga memberi pesan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dan merawat budaya.

Komposisi Alat Kelengkapan Dewan DPRD Makassar Periode 2024-2029

Komisi A Bidang Pemerintahan

1. A Pahlevi (Ketua)
2. Ruslan Mahmud (Wakil Ketua)
3. Irwan Jafar (Sekretaris)
4. Syaiful (Anggota)
5. Andi Hadi Ibrahim Baso (Anggota)
6. Idris (Anggota)
7. Andi Makmur Burhanuddin (Anggota)
8. Udin Shaputra Malik (Anggota)
9. Rachmat Taqwa Qurai (Anggota)
10. Tri Sulkarnaain Ahmad (Anggota)
11. Muhammad Nasir R (Anggota)

Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan

1. Ismail (Ketua)
2. Irfan Malluserang (Wakil Ketua)
3. Andi Tenri Uji Idris (Sekretaris)
4. H. Ruslan Lallo (Anggota)
5. Drs. Arifin Majid (Anggota)
6. Hartono (Anggota)
7. Kasrudi (Anggota)
8. Basdir (Anggota)
9. Zulhajar (Anggota)
10. William (Anggota)
11. Umiyati (Anggota)
12. Rezki (Anggota)
13. Irmawati Sila (Anggota)

Komisi C Bidang Pembangunan

1. Azwar Rasmin (Ketua)
2. Fasruddin Rusly (Wakil Ketua)
3. Ray Suryadi Arsyad (Sekretaris)
4. M Yahya (Anggota) 5. Jufri Pabe (Anggota)
6. Muhammad Yulianto Badwi (Anggota)
7. Muh Farid Rayendra (Anggota)
8. Imam Musakkar (Anggota)
9. Mesakh R Rantepadang (Anggota)
10. Irwan Hasan (Anggota)
11. Sangkala Saddiko (Anggota)

Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Ari Ashari Ilham (Ketua)
2. Rezki Nur (Wakil Ketua)
3. Fahrizal Arrahman Husain (Sekretaris)
4. A Odhika Cakra Satriawan (Anggota)
5. Eshin Usami Nur Rahman G (Anggota)
6. Adi Akbar (Anggota)
7. Budi Hastuti (Anggota)
8. Andi Suhada Sappaile (Anggota)
9. Meinsani Kecca (Anggota)
10. Ir. Muchlis A Misbah (Anggota)
11. Yulius Patandianan (Anggota)

Badan Musyawarah (Bamus)

1. Supratman (Ketua merangkap Anggota)
2. Anwar Faruq (Wakil Ketua merangkap Anggota)
3. Eric Horas (Wakil Ketua merangkap Anggota)
4. M. Yahya (Anggota)
5. Ruslan Lallo (Anggota)
6. Syaiful (Anggota)
7. Jufri Pabe (Anggota)
8. Muhammad Yulianto Badwi (Anggota)
9. Ruslan Mahmud (Anggota)
10. Eshin Usami Nur Rahman (Anggota)
11. Azwar Rasmin (Anggota)
12. Adi Akbar (Anggota)
13. Andi Hadi Ibrahim Baso (Anggota)
14. Budi Hastuti (Anggota)
15. Idris (Anggota)
16. Muh Farid Rayendra (Anggota)
17. Fahrisal Arrahman Husain (Anggota)
18. Zulhajar (Anggota)
19. William (Anggota)
20. Udin Shaputra Malik (Anggota)
21. Umiyati (Anggota)
22. Meinsani Kecca (Anggota)
23. Rezki (Anggota)
24. Muchlis A Misbah (Anggota)
25. Sangkala Saddiko (Anggota)
26. Dahyal (Sekretaris Bukan Anggota)

Badan Anggaran (Banggar)

1. Supratman (Ketua merangkap Anggota)
2. Andi Suharmika (Wakil Ketua merangkap Anggota)
3. Eric Horas (Wakil Ketua merangkap Anggota)
4. Ari Ashari Ilham (Anggota)
5. Irwan Jafar (Anggota)
6. Jufri Pabe (Anggota)
7. A Odhika Cakra Satriawan (Anggota)
8. Ismail (Anggota)
9. Ruslan Mahmud (Anggota)
10. Arifin Majid (Anggota)
11. Andi Hadi Ibrahim Baso (Anggota)
12. Hartono (Anggota)
13. Rezki Nur (Anggota)
14. Kasrudi (Anggota)
15. A Pahlevi (Anggota)
16. Budi Hastuti (Anggota)
17. Basdir (Anggota)
18. Imam Musakkar (Anggota)
19. Mesakh R Rantepadang (Anggota)
20. Iandi Suhada Sappaile (Anggota)
21. Fasruddin Rusly (Anggota)
22. Irwan Hasan (Anggota)
23. Ray Suryadi Arsyad (Anggota)
24. Irmawati Sila (Anggota)
25. Muhammad Nasir R (Anggota)
26. Dahyal (Sekretaris Bukan Anggota)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

1. Supratman (Ketua merangkap Anggota)
2. Andi Suharmika (Wakil Ketua merangkap Anggota)
3. Anwar Faruq (Wakil Ketua merangkap Anggota)
4. Eric Horas (Wakil Ketua merangkap Anggota)
5. Basdir (Ketua)
6. Rahmat Taqwa Qurais (Wakil Ketua)
7. Ari Ashari Ilham (Anggota)
8. Irwan Jafar (Anggota)
9. Arifin Majid (Anggota)
10. Eshin Usami Nur Rahman (Anggota)
11. Adi Akbar (Anggota)
12. Hartono (Anggota)
13. Kasrudi (Anggota)
14. Muh Farid Rayendra (Anggota)
15. Andi Tenri Uji Idris (Anggota)
16. Tri Sulkarnain Ahmad (Anggota)
17. Yulius Patandianan (Anggota)
18. Dahyal (Sekretaris Bukan Anggota)

Badan Kehormatan (BK)

1. William (Ketua)
2. Budi Hastuti (Wakil Ketua)
3. M Yahya (Anggota)
4. Muchlis A Misbah (Anggota)
5. Irfan Malluserang (Anggota)

TABLOID RUMAH RAKYAT

DPRD KOTA MAKASSAR

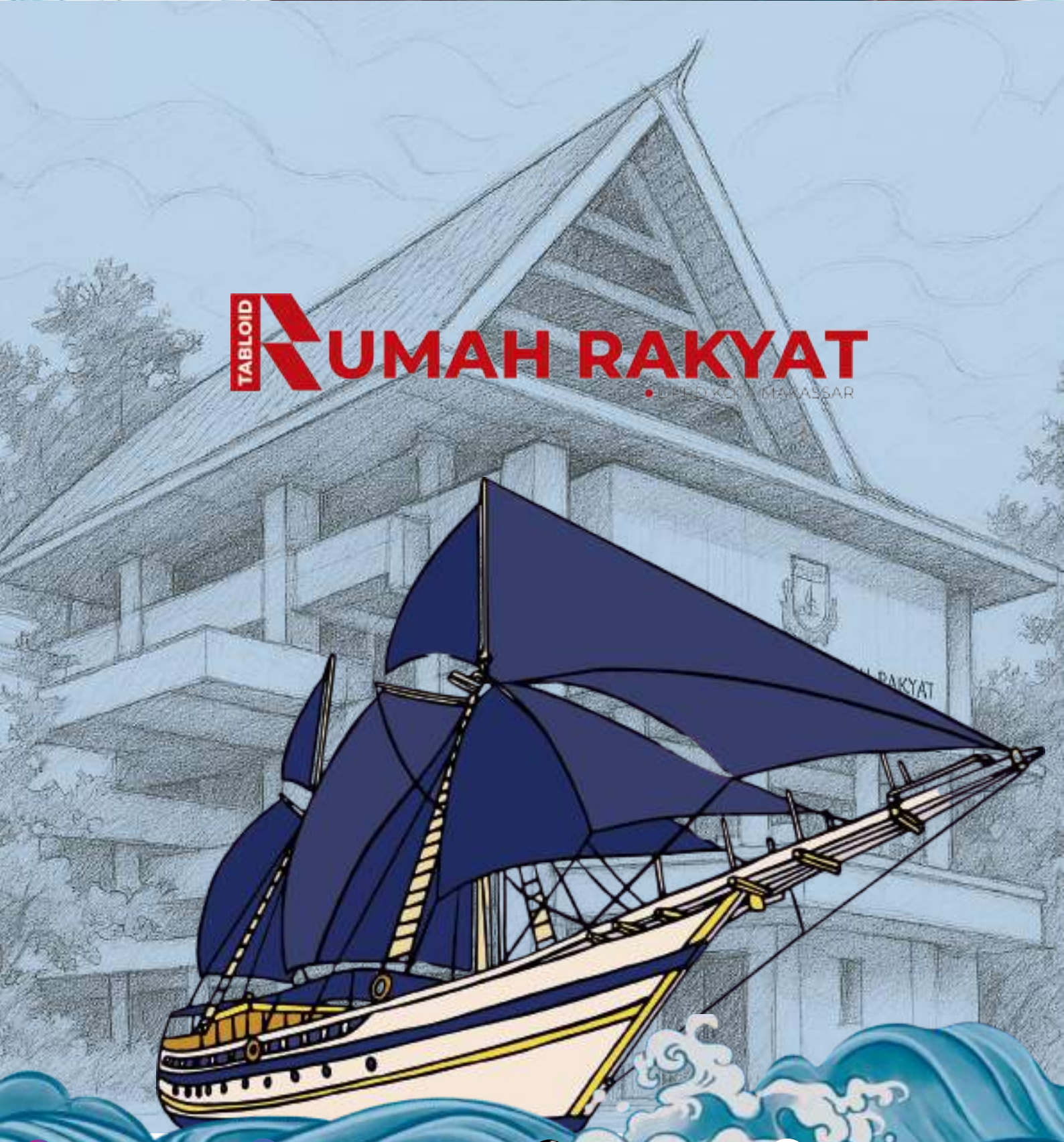

@dprd.makassar @humasdprdmakassar setwan_dprd.mks Humas DPRD Makassar

https://dprd.makassar.go.id